

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan suatu kawasan perairan dimana terdapat fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menunjang operasional perahu atau kapal nelayan dan berbagai basis aktifitas produksi, pemasaran, pengolahan hasil laut, dan pengembangan masyarakat nelayan, dimana dengan fasilitas tersebut pelabuhan perikanan bisa menyumbang peran untuk meningkatkan perekonomian, mengembangkan usaha perikanan, dan menjadi fungsi pembinaan dan pelayanan publik (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 1994).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai wadah aktifitas pemerintahan dan aktifitas sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat untuk kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang difasilitasi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lubis (2006), dimana pelabuhan perikanan ialah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan aktifitas penangkapan ikan yang difasilitasi dengan berbagai fasilitas mulai dari ikan didaratkan hingga didistribusikan. Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan yang mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari produksi, pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional serta internasional. Secara terperinci aspek-aspek tersebut meliputi: (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994)

1. Produksi, bahwa pelabuhan perikanan merupakan wadah bagi nelayan untuk melakukan aktifitas-aktifitas produksinya, dimulai dari pemenuhan kebutuhan perbekalan untuk kegiatan penangkapan ikan di laut hingga pembongkaran hasil tangkapannya.

2. Pengolahan, bahwa pelabuhan perikanan menyediakan berbagai sarana yang diperlukan untuk mengolah hasil tangkapannya.
3. Pemasaran, bahwa pelabuhan perikanan adalah pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, klasifikasi pelabuhan perikanan terbagi menjadi 4 (empat) kelas, yakni atas dasar bobot dan beban pelayanan serta jangkauan operasi kapal yang dapat dilihat sebagai berikut:

A. Pelabuhan Perikanan Samudera (Kelas A) dengan kriteria:

1. Kriteria teknis meliputi:

- a. Dapat melayani kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- b. Mempunyai fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan dengan ukuran minimal 60 GT;
- c. Panjang dermaga meliputi sekurang-kurangnya 300 m, dengan kolam dengan kedalaman minimal minus 3 m;
- d. Dapat menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan minimal 6.000 GT; dan
- e. Memanfaatkan dan mengelola lahan minimal 20 ha.

2. Kriteria operasional meliputi:

- a. Ikan yang didaratkan sebagian ditujukan untuk ekspor;
- b. Terdapat kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
- c. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

B. Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kelas B) dengan kriteria:

1. Kriteria teknis meliputi:

- a. Dapat melayani kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
- b. Mempunyai fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 30 GT;

- c. Panjang dermaga minimal 150 m, dengan kolam dengan kedalaman minimal minus 3 m;
- d. Dapat menampung kapal perikanan minimal 75 unit atau jumlah keseluruhan minimal 2.250 GT;
- e. Memanfaatkan dan mengelola lahan minimal 10 ha.

2. Kriteria operasional meliputi:

- a. Terdapat kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari;
- b. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

C. Pelabuhan Perikanan Pantai (Kelas C) dengan kriteria:

1. Kriteria teknis meliputi:

- a. Dapat melayani kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di perairan Indonesia;
- b. Mempunyai fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 10 GT;
- c. Panjang dermaga minimal 100 m, dengan kolam dengan kedalaman minimal minus 2 m;
- d. Dapat menampung kapal perikanan minimal 30 unit atau jumlah keseluruhan minimal 300 GT;
- e. Memanfaatkan dan mengelola lahan minimal 5 ha.

2. Kriteria operasional meliputi:

- a. Terdapat kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
- b. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

D. Pangkalan Pendaratan Ikan (Kelas D) dengan kriteria:

1. Kriteria teknis meliputi:

- a. Dapat melayani kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di perairan Indonesia;
- b. Mempunyai fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 5 GT;
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kolam dengan kedalaman minimal minus 1 m;

d. Dapat menampung kapal perikanan minimal 15 unit atau jumlah keseluruhan minimal 75 GT;

e. Memanfaatkan dan mengelola lahan minimal 1 ha.

2. Kriteria operasional meliputi kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Apabila ditinjau dari besar atau kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006, tipe klasifikasi pelabuhan perikanan terbagi menjadi 4 (empat), yakni:

1. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): ditujukan untuk kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas.
2. Tipe B, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): ditujukan untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.
3. Tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): ditujukan untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai atau pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
4. Tipe D, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): ditujukan untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, terdapat keberagaman terkait definisi dan klasifikasi pelabuhan perikanan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni pelabuhan perikanan mempunyai wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan yang difasilitasi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan di pelabuhan perikanan dimulai dari berlabuhnya kapal, bongkar muat ikan, penangkapan ikan, pendaratan ikan, hingga pendistribusian ikan. Ditinjau dari bobot dan beban pelayanan serta jangkauan operasi kapal, pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi 4 kelas, meliputi Kelas A, B, C, dan D. Pada penelitian ini, apabila ditinjau dari bobot dan beban pelayanan serta jangkauan operasi kapal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) diklasifikasikan sebagai pelabuhan kelas/tipe D.

2.2 Pangkalan Pendaratan Ikan

Departemen Kelautan dan Perikanan (2004) menyatakan bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ialah lingkungan kerja aktivitas ekonomi perikanan yang mencakup areal perairan dan daratan, sesuai dengan fungsinya ditujukan untuk pelayanan bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan dengan kapal-kapal berukuran kecil dengan jangkauan tangkapan di sekitar pantai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pelabuhan perikanan kelas d yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria teknis meliputi:

- a. Dapat melayani kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di perairan Indonesia;
- b. Mempunyai fasilitas tambat dan labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 5 GT;
- c. Panjang dermaga minimal 50 m, dengan kolam dengan kedalaman minimal minus 1 m;
- d. Dapat menampung kapal perikanan minimal 15 unit atau jumlah keseluruhan minimal 75 GT;
- e. Memanfaatkan dan mengelola lahan minimal 1 ha.

2. Kriteria operasional meliputi kegiatan bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Adapun fungsi pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, sebagai berikut:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat ikan;
3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Lubis, 2012) bahwa berdasarkan fungsinya PPI dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu fungsi yang dilihat dari segi aktivitas dan pendekatan kepentingannya, dimana jenis-jenis fungsi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama. Fungsi PPI ditinjau dari pendekatan kepentingan yaitu berupa fungsi jasa, yang meliputi segala jasa-jasa pelabuhan dimulai dari ikan didaratkan hingga ikan didistribusikan. Fungsi jasa dikelompokkan menjadi: (Lubis, 2012)

1. Jasa-jasa yang berfungsi untuk melayani pendaratan ikan, meliputi penyediaan alat pengangkut ikan, keranjang-keranjang atau bak plastik, dan buruh untuk membongkar ikan;
2. Jasa-jasa yang berfungsi untuk melayani kapal-kapal penangkap ikan, yakni dalam penyediaan air bersih, es dan bahan bakar minyak;
3. Jasa-jasa yang berfungsi untuk menangani mutu ikan, yakni terdapatnya fasilitas *cold storage*, *cool room*, penyediaan air bersih, dan pabrik es;
4. Jasa-jasa yang berfungsi untuk melayani keamanan pelabuhan, meliputi adanya jasa pemanduan untuk kapal-kapal yang masuk dan keluar pelabuhan, dan berfungsi untuk memeriksa surat-surat kapal dan jumlah serta jenis barang atau ikan yang dibawa kapal tersebut;
5. Jasa-jasa yang berfungsi untuk pemeliharaan kapal dan pelabuhan yaitu terdapat fasilitas *docking*, *slipway* dan bengkel.

Kemudian fungsi PPI yang dari segi aktivitasn yaitu sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan berdasarkan aspek pendaratan, produksi, dan pembongkaran ikan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan bagi masyarakat nelayan. Penjelasan masing-masing fungsi secara terperinci sebagai berikut: (Lubis, 2006)

1. Fungsi Pembongkaran dan Pendaratan

Pelabuhan perikanan ditekankan sebagai tempat pemusatan sarana dan aktivitas pendaratan dan pembongkaran hasil tangkapan di laut. Pelabuhan perikanan yang berperan sebagai tempat untuk pemusatan armada penangkap ikan guna mendaratkan hasil tangkapan, tempat berlabuh, dan menjamin kelancaran pembongkaran ikan dan penyediaan bahan perbekalan.

2. Fungsi Pengolahan

Dalam hal ini pelabuhan perikanan merupakan tempat guna membina pengendalian mutu dan peningkatan mutu ikan untuk menghindari kerugian dari pasca tangkap. Fungsi pengolahan adalah salah satu fungsi yang krusial terutama pada saat musim ikan yakni untuk menampung produksi perikanan yang tidak/belum habis terjual dalam bentuk segar.

3. Fungsi Pemasaran

Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat guna menciptakan mekanisme pasar yang dapat menguntungkan nelayan maupun pedagang. Sehingga dengan demikian maka sistem pemasaran dari tempat pelelangan ikan harus diatur secara baik dan terorganisir. Pelelangan ikan merupakan aktivitas awal dari pemasaran ikan di pelabuhan perikanan guna mendapatkan harga yang memadai dan layak khususnya untuk nelayan.

4. Fungsi Pembinaan Terhadap Masyarakat Nelayan

Fungsi pembinaan menyatakan bahwa pelabuhan perikanan bisa dijadikan sebagai lapangan kerja untuk masyarakat di sekitarnya dan sebagai tempat pembinaan masyarakat perikanan yakni; nelayan, pedagang, pengolah dan buruh angkut supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Dari pembinaan ini, pelaku atau pengguna di pelabuhan diharapkan mampu menguasai aktivitasnya lebih baik sehingga masing-masing pengguna dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan yang optimal.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, diketahui bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah lingkungan kerja aktivitas ekonomi perikanan yang ditujukan untuk pelayanan bagi masyarakat nelayan. Berdasarkan fungsinya, PPI berfungsi sebagai tempat untuk; Pelayanan untuk tambat dan labuh kapal perikanan, Pelayanan untuk bongkar muat ikan, Pelayanan untuk pengolahan hasil perikanan, Pelayanan pemasaran dan distribusi ikan, Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, Pelayanan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.

2.3 Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, telah dijelaskan dimana fasilitas

pelabuhan perikanan adalah berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di Pelabuhan Perikanan untuk menunjang operasional pelabuhan. Terdapat beberapa fasilitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi: (Lubis, 2012)

1. Fasilitas pokok

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam aktivitas di suatu pelabuhan perikanan, dimana fasilitas ini berfungsi untuk menjamin kelancaran dan keamanan kapal pada saat berlayar keluar masuk pelabuhan serta pada saat berlabuh di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas pokok diuraikan sebagai berikut:

a. Dermaga

Dermaga merupakan bangunan kelautan yang berfungsi sebagai tempat untuk kapal berlabuh dan bertambat, bongkar muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk kebutuhan melaut.

b. Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan adalah daerah perairan pelabuhan sebagai tempat untuk masuknya kapal yang akan bersandar di dermaga.

c. Alat Bantu Navigasi

Alat bantu navigasi merupakan alat yang memiliki kegunaan untuk:

- 1) Menunjukkan peringatan atau tanda terhadap bahaya yang tersembunyi, sebagai contoh yaitu batu karang di suatu perairan.
- 2) Memberikan petunjuk supaya kapal bisa berlayar dengan aman.
- 3) Memberikan petunjuk sewaktu kapal keluar masuk pelabuhan atau ketika kapal merapat dan melempar jangkar.

d. Pemecah Gelombang

Merupakan suatu struktur bangunan kelautan yang memiliki kegunaan khususnya untuk melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap pengaruh dari gelombang laut.

2. Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berguna untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok agar mampu mendukung kegiatan di pelabuhan, dimana penyediaan fasilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional

masing-masing pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas-fasilitas fungsional yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Fasilitas penanganan hasil tangkapan dan pemasaran, meliputi:
 - 1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yakni sebagai tempat untuk kegiatan pelelangan ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan) dengan pembeli (pedagang maupun agen perusahaan ikan);
 - 2) Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, seperti gedung pengolahan ikan dan tempat penjemuran ikan;
 - 3) Pabrik es, tempat untuk memproduksi es untuk mempertahankan mutu ikan pada saat penangkapan ikan dan proses pengangkutan ikan menuju pasar atau pabrik;
 - 4) Gudang es, digunakan sebagai tempat penyimpanan es jika produksi es kemungkinan tidak terserap pasar secara keseluruhan, pabrik es jauh dari dermaga perbekalan (*out fitting*) atau kemungkinan *import* es dari luar;
 - 5) Refrigerasi atau fasilitas pendingin, seperti *cold room*, *cold storage*;
 - 6) Gedung pemasaran, tempat ini difasilitasi dengan berbagai fasilitas seperti alat sortir, pengepakan, timbangan dan lainnya.
- b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan untuk armada dan alat penangkap ikan, meliputi:
 - 1) Lapangan perbaikan alat penangkap ikan;
 - 2) Ruang mesin;
 - 3) Tempat penjemuran untuk alat penangkap ikan;
 - 4) Bengkel: sarana untuk memperbaiki mesin kapal;
 - 5) *Slipway*: alat untuk memperbaiki lunas kapal;
 - 6) Gudang jaring: tempat untuk menyimpan jaring;
 - 7) *Vessel lift*: fasilitas untuk mengangkat kapal dari kolam pelabuhan ke lapangan perbaikan kapal.
- c. Fasilitas perbekalan, yakni instalasi air minum, tangki air, dan tangki bahan bakar.

3. Fasilitas penunjang

www.itk.ac.id

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara tidak langsung berperan untuk meningkatkan fungsi pelabuhan sehingga para pengguna pelabuhan memperoleh kenyamanan dalam melakukan berbagai kegiatan di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas penunjang diuraikan sebagai berikut:

- a. Fasilitas kesejahteraan, yakni poliklinik, MCK, kantin, mess, dan musholla;
- b. Fasilitas administrasi, meliputi ruang operator, kantor pengelola pelabuhan, kantor beacukai, kantor syahbandar, dan lain-lain.

2.4 Kegiatan Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan

Operasionalisasi merupakan pengaplikasian dari berbagai bentuk aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan di pelabuhan perikanan (PP) maupun di pangkalan pendaratan ikan (PPI) dalam pelayanan kebutuhan masyarakat pengguna yang membutuhkannya, dimana kegiatan operasional PPI pada dasarnya berorientasi pada kepentingan pengguna jasa PPI, yang berarti operasionalisasi PPI mengacu pada pelayanan yang prima. Operasional pelabuhan perikanan merupakan gerakan atau tindakan sebagai bentuk implementasi rencana yang telah dikembangkan guna memanfaatkan fasilitas-fasilitas pada pelabuhan perikanan agar bernilai guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) secara optimal untuk “fasilitas itu sendiri” atau “fasilitas lainnya yang terkait” (Murdiyanto, 2004)

Lubis (2006) mengemukakan bahwa terdapat prinsip-prinsip penting apabila pengoperasian suatu pelabuhan perikanan dinyatakan berhasil, yakni:

1. Sangat baik dilihat dari sudut ekonomi, menunjukkan bahwa hasil pengoperasian pelabuhan itu bisa menguntungkan bagi pengelola pelabuhan itu sendiri dan bagi pengguna pelabuhan. Kemudian hasil pengoperasian pelabuhan tersebut memiliki pengaruh yang positif pada perkembangan kota dan nasional.
2. Sistem penanganan ikan yang efektif dan efisien. Berarti bahwa pembongkaran ikan mampu dilakukan secara singkat (cepat) diikuti dengan penyeleksian secara cermat, pengangkutan dan penanganan yang cepat.

3. Fleksibel dalam perkembangan teknologi. Dalam pengembangan pelabuhan perikanan, ada saatnya dibutuhkan mekanisasi dari berbagai fasilitas di pelabuhan tersebut. Seperti diperlukannya *vessel lift* untuk fasilitas dock, tangga berjalan (*tapis roulant*) pada penyaluran ikan dari kapal menuju tempat pelelangan ikan, mekanisasi fasilitas penyeleksian ikan menurut jenis dan berat.
4. Perluasan fasilitas untuk fasilitas yang telah melampaui kapasitasnya dan penambahan jenis fasilitas dengan menyesuaikan kebutuhannya.
5. Pelabuhan dapat berkembang dengan tidak merusak lingkungan sekitarnya (lingkungan sosial dan lingkungan alam)
6. Organisasi serta para pelaku di dalam pelabuhan bekerja secara aktif dan terorganisasi baik dalam aktivitasnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyatakan bahwa kegiatan operasional PPI meliputi:

1. Kegiatan produksi Ikan
2. Frekuensi kunjungan kapal
3. Pelayanan kebutuhan logistik

Sedangkan Direktorat Jenderal Perikanan (1994) menjelaskan bahwa kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan meliputi:

1. Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di suatu pelabuhan perikanan hampir seluruhnya berasal dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan tersebut, hanya terdapat sebagian kecil yang berasal dari pelabuhan perikanan lain yang dibawa dengan menggunakan transportasi darat.

2. Penanganan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Selaras dengan salah satu fungsinya yakni sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar di pelabuhan perikanan dilaksanakan dengan menggunakan metode pendinginan yang bisa dilakukan dengan menggunakan es. Pengolahan ikan bertujuan untuk mempertahankan mutu ikan sehingga pada saat pemasaran menjadi lebih lama

dan dapat meningkatkan nilai jual ikan, aktivitas pemasaran yang dilakukan di pelabuhan perikanan bersifat lokal, nasional serta ekspor.

3. Penyaluran Perbekalan

Penjualan/pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan perikanan saat ini adalah penjualan es, air bersih dan penyaluran BBM. Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT Pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN dan pihak swasta.

Pada dasarnya suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan dinyatakan berhasil tergantung pada kelancaran kegiatannya, dimulai dari proses praproduksi, pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan serta pemasaran hasil tangkapan (Murdiyanto, 2004).

2.5 Kinerja

2.5.1 Pengertian Kinerja dan Pengukurannya

Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, kinerja merupakan hasil kerja dari instansi yang terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja pelayanan operasional ialah hasil kerja yang dapat diukur yang dicapai suatu pelabuhan dalam melakukan pelayanan kapal, utilisasi fasilitas dan alat dan barang, pada periode waktu dan satuan tertentu. Indikator untuk kinerja pelayanan operasional yakni berbagai variabel pelayanan, penggunaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, kemudian untuk standar kinerja pelayanan operasional meliputi standar hasil kerja dari pelayanan-pelayanan yang harus dicapai oleh penyelenggara pelabuhan dalam pengimplementasian pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan (Departemen Perhubungan, 2008). Pengukuran terhadap kinerja sektor publik terhadap beberapa hal berbeda dengan sektor swasta, dimana kepuasan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur pengukuran kinerja dikarenakan kehadiran sektor publik berfungsi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik dimana seringkali sulit diukur dalam bentuk finansial (Mahmudi, 2007).

Windasuri (2017) mengemukakan bahwa dalam mengukur kinerja pelayanan, terdapat 5 (lima) elemen kunci yang meliputi:

1. *Reliability*, Reabilitas menggambarkan kemampuan untuk memberikan apa yang telah dijanjikan dengan tepat, andal, serta akurat. *Realible* (bisa diandalkan), karena dasar dari setiap hubungan antara pemberi layanan dengan pelanggan dimulai dari kepercayaan.
2. *Assurance*, *Assurance* adalah kemampuan untuk memberikan sesuatu yang terpercaya (dapat dipercaya). Pelanggan perlu merasa bahwa pilihannya telah tepat, yakni mengambil keputusan yang tepat untuk memenuhi harapannya.
3. *Tangible*, berhubungan dengan fasilitas fisik atau peralatan, serta penampilan personal pada penyedia layanan.
4. *Empathy*, berkaitan dengan perhatian dan tingkat kepedulian individu yang diberikan kepada pelanggan yang merupakan elemen krusial untuk membangun kedekatan hubungan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
5. *Responsive*, responsif menggambarkan kemampuan untuk memberikan layanan yang cepat dan tanggap dan membantu pelanggan.

2.5.2 Elemen Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, terdapat elemen-elemen pokok yang dikemukakan oleh Mahsun (2013), yang meliputi:

1. Menentukan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dalam organisasi. Sasaran adalah tujuan organisasi yang telah dinyatakan secara eksplisit dengan batasan waktu yang jelas. Strategi merupakan teknik atau cara yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja berdasarkan penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja dirumuskan dengan mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, kemudian

www.itk.ac.id

pengukuran kinerja dapat dilaksanakan. Pengukuran tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi ialah membandingkan hasil konkret dengan indikator dan ukuran kinerja yang sudah ditentukan.

4. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan mencerminkan mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi kepada penerima informasi. Informasi pencapaian kinerja bisa dijadikan:
 - a. *Feedback*. Hasil pengukuran pada capaian kinerja dapat menjadi acuan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi guna perbaikan kinerja di periode berikutnya. Dapat dijadikan sebagai landasan pemberian hadiah dan hukuman terhadap manajer dan anggota organisasi.
 - b. Penilaian kemajuan organisasi. Kinerja yang dilaksanakan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat guna menilai kemajuan yang sudah dicapai suatu organisasi.
 - c. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja memperoleh informasi yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen serta stakeholders.

2.5.3 Kinerja Pelabuhan Perikanan

Mengacu pada fungsi pelabuhan perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan serta Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008) dan menurut pendapat Mahmudi (2007) yang menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah salah satu tolak ukur suatu pelayanan publik serta kepuasan pelanggan bisa dinyatakan sebagai tujuan dalam suatu sistem pengukuran kinerja. Maka diperoleh 6 faktor dalam mengukur kinerja pelabuhan perikanan, antara lain:

1. **Produksi ikan**

Dasar dari kriteria penilaian faktor produksi ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, dimana penetapan besarnya produksi ikan yang didaratkan untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) minimal 730 ton/tahun.

2. **Frekuensi kunjungan kapal**

Dasar dari kriteria penilaian faktor frekuensi kunjungan kapal mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, penentuan nilai angka kunjungan kapal ke pelabuhan ialah kunjungan kapal yang melakukan kegiatan pendaratan ikan serta mengisi bahan perbekalan untuk masing-masing kelas/tipe pelabuhan perikanan berbeda. Dimana untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) frekuensi kunjungan kapal minimal 475 kali/tahun.

3. Penyediaan perbekalan melaut

Kegiatan penyediaan perbekalan melaut terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu penyediaan air bersih, BBM, dan Es. Berikut merupakan dasar kriteria penilaian pada masing-masing kegiatan:

a. Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, penentuan nilai jumlah penyediaan air bersih untuk masing-masing kelas/tipe pelabuhan perikanan berbeda. Dimana untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) penyediaan air bersih minimal 3.650 ton/tahun.

b. Penyediaan BBM

Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, penentuan nilai jumlah penyediaan BBM untuk masing-masing kelas/tipe pelabuhan perikanan berbeda. Dimana untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) penyediaan BBM minimal 1.460 ton/tahun.

c. Penyediaan Es

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, penentuan nilai jumlah penyediaan es untuk masing-masing kelas/tipe pelabuhan perikanan berbeda. Dimana untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) penyediaan es minimal 1.825 ton/tahun.

4. Pengolahan

Dasar dari kriteria penilaian faktor pengolahan yakni mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, dimana pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pembinaan mutu perikanan.

5. Pemasaran

Dasar dari kriteria penilaian faktor pemasaran yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, yang menyatakan bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat pemasaran dan distribusi ikan.

6. Kepuasan pelanggan (nelayan)

Menurut Mahmudi (2007), kepuasan pelanggan menunjukkan hasil penilaian pelanggan pada hal yang diharapkannya dengan membeli suatu produk, dimana kepuasan mempunyai subjek yaitu pelanggan dan objek yaitu produk barang dan jasa. Kepuasan pelanggan adalah suatu tolak ukur keberhasilan pelayanan publik, yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dijadikan sebagai tujuan dalam suatu sistem pengukuran kinerja (Mahmudi, 2007). Sehingga penetapan indikator kinerja harus meliputi indikator kepuasan pelanggan dalam mengukur suatu kinerja pelayanan.

Adapun 5 pendorong utama kepuasan pelanggan yang dapat dilihat sebagai berikut: (Irawan, 2002)

1. Kualitas produk: Pelanggan merasa puas apabila setelah membeli dan menggunakan produk, kualitas produk tersebut baik.
2. Harga: Bagi pelanggan yang sensitif, harga yang murah merupakan sumber kepuasan yang krusial karena mereka mendapatkan *value for money* yang tinggi.
3. *Service Quality* (ServQual): Kualitas produk dan harga biasanya tidak bisa menciptakan keunggulan yang bersaing dalam hal kepuasan dan keduanya mudah ditiru, maka dari itu perusahaan menggunakan pendorong ini. *Service quality* sangat bergantung pada tiga hal, yaitu; sistem, teknologi dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi sebesar 70%, maka dari itu kepuasan terhadap kualitas pelayanan umumnya sulit untuk ditiru.

4. *Emotional factor*: Pendorong ini umumnya relatif krusial bagi beberapa produk yang berkaitan dengan gaya hidup seperti kosmetik, mobil, dan pakaian.
5. Kemudahan: Pelanggan akan merasa makin puas jika relatif nyaman, mudah, dan efisien dalam memperoleh pelayanan produk.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa suatu kinerja pelabuhan perikanan dapat diukur dengan melihat operasional dan pelayanannya. Kinerja pelayanan adalah hasil kerja yang dapat diukur yang dicapai pelabuhan dalam melakukan pelayanan kapal, utilisasi fasilitas dan alat dan barang, pada periode waktu dan satuan tertentu. Dalam mengukur kinerja pelayanan terdapat 5 (lima) elemen kunci, yaitu; *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsive*. Sehingga berdasarkan ketentuan dari peraturan dan pendapat ahli tersebut diperoleh 6 faktor dalam mengukur kinerja pelabuhan perikanan, yaitu: produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, penyediaan perbekalan, pengolahan, pemasaran, serta kepuasan pelanggan yaitu nelayan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Studi Penelitian Terdahulu*)

No	Nama dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1.	Novia Okta Sari (2019)	Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1. Mengetahui seberapa besar tingkat kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dengan melihat aktivitas operasional dan kepuasan nelayan terhadap pelayanan pelabuhan	Produksi Ikan Frekuensi Kunjungan Kapan Penyediaan BBM Penyediaan Es Penyediaan Air Bersih Kepuasan Nelayan Terhadap Fasilitas Pelabuhan	Skoring dan Deskriptif	Hasil dari penelitian ini meliputi aktivitas operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dan tingkat kinerja operasional dan kepuasan nelayan terhadap pelayanan pelabuhan.
2.	Nur Adhi Wicaksono (2013)	Analisis Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal Dalam Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	1. Mengetahui sumber daya perikanan tangkap di PPP Tegalsari. 2. Mengetahui tingkat kinerja pengelolaan PPP Tegalsari. 3. Menganalisis tingkat kinerja pengelolaan PPP Tegalsari terhadap kepuasan nelayan pegawai di PPP Tegalsari.	Pendaratan Ikan Tambat Labuh Kapal Bongkar Muat Perbekalan	Deskriptif dan Servqual	Hasil dari penelitian ini meliputi tingkat kepuasan pengguna jasa layanan PPP Tegalsari dari berbagai unsur dimensi kualitas pelayanan.
3.	Yuliana Anastasia	Kinerja Operasional	1. Mendapatkan nilai	Produksi Ikan	Skoring	Hasil dari penelitian

No	Nama dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
	Ngamel (2013)	1 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	kinerja operasional PPN Tual	Frekuensi Kunjungan Kapal Penyediaan BBM Penyediaan Air Bersih Kepuasan Nelayan Terhadap Fasilitas Pelabuhan		ini meliputi tingkat kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

*) Sintesa Penulis, 2020

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, adapun kontribusi dari penelitian terdahulu yang diperoleh yaitu variabel-variabel penelitian dan teknik analisis data. Variabel-variabel tersebut merupakan beberapa operasional yang terdapat di pelabuhan perikanan, yang meliputi; Produksi Ikan, Frekuensi Kunjungan Kapal, Penyediaan BBM, Penyediaan Air Bersih, dan Penyediaan Es. Lalu teknik analisis data yang diadopsi adalah metode skoring untuk menganalisis kinerja operasional pelabuhan perikanan.

2.7 Sintesa Pustaka

Dari hasil tinjauan teoritis yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh sintesa pustaka yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Sintesa Pustaka *)

Sasaran	Faktor	Variabel	Sumber
Menganalisis kinerja operasional di PPI Manggar Baru	Produksi Ikan	1. Produksi Ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan
	Kunjungan kapal	2. Frekuensi Kunjungan Kapal	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan
	Perbekalan	3. Penyediaan BBM	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran	Faktor	Variabel	Sumber
			No.432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Tangkap
		4. Penyediaan Air Bersih	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Tangkap
		5. Penyediaan Es	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.432/DPT3/0T.220.D3/I/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Tangkap
	Penanganan	6. Pengolahan Hasil Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan
	Pemasaran	7. Pendistribusian Hasil Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan
	Pelayanan Tambat Labuh	8. Dermaga	Lubis (2012)
		9. Kolam Pelabuhan	Lubis (2012)
	Pelayanan Pendaratan Ikan	10. Alat Pengangkut Ikan	Lubis (2012)
		11. Cold Storage	Lubis (2012)
		12. Cold Room	Lubis (2012)
		13. Pabrik Es	Lubis (2012)
	Pelayanan Penanganan Mutu Ikan	14. Tempat Penjemuran Ikan	Lubis (2012)
		15. Gedung Pengolahan	Lubis (2012)
	Pelayanan Pemasaran	16. TPI	Lubis (2012)
		17. Air Bersih	Lubis (2012)
	Pelayanan Perbekalan	18. Es	Lubis (2012)
		19. BBM	Lubis (2012)
	Pelayanan Perbaikan dan Pemelihara	20. Lapangan	Lubis (2012)
		21. Perbaikan Alat Ruang Mesin	Lubis (2012)
		22. Tempat	Lubis (2012)

Sasaran	Faktor	Variabel	Sumber
an Kapal	Penjemuran Alat Tangkap	23. Bengkel	Lubis (2012)
		24. <i>Slipway</i>	Lubis (2012)
		25. Gudang jaring	Lubis (2012)
		26. <i>Vessel Lift</i>	Lubis (2012)
		27. Petugas	Lubis (2012)
Pelayanan Keamanan	Keamanan		

*) Sintesa Penulis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa teori yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui bahwa diperoleh 12 faktor dan 27 variabel yang digunakan dalam mengukur kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manggar Baru.

